

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



RENJA

RENCANA KERJA 2022

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43-45 Telp. (0334) 881606
LUMAJANG - 67313

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja 2022 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2022 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LUMAJANG



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	33
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
4.1. Program Utama.....	51
4.2. Alokasi Anggaran	54
BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah - langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan,

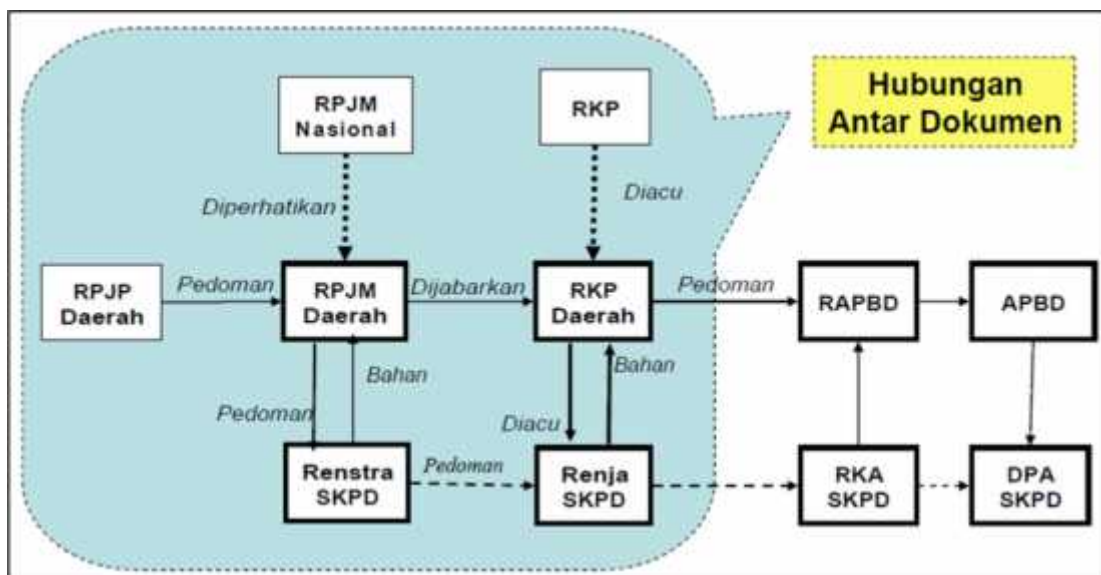
sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas, selanjutnya menjadi pedoman di lingkungan Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Keterkaitan Antara Renja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023
 20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara umum. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni

- Kontribusi PDRB Sektor Koperasi
- Kontribusi PDRB Sektor Usaha Mikro

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan;

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang : uraian penutup.

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM
3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%					100%		
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%					100%		

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 dok							2 dok		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok							1 dok		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok							1 dok		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 dok							1 dok		
2	1	0	2	0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%							100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	24 ASN							24 ASN		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 fasilitasi							1 fasilitasi		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 dok							5 dok		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 dok							5 dok		

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok							1 dok		
2	1	0	2	0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%							100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 stel							45 stel		
2	1	0	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100%							100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 jenis							10 jenis		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis							40 jenis		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis							8 jenis		
							jumlah fasilitas penggandaan dokumen	1 fasilitas								1 fasilitas	
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 jenis							2 jenis		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 fasilitas							1 fasilitas		

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	3 fasilitasi						3 fasilitasi		
2	1	0	2	0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%						100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	10 jenis						10 jenis		
2	1	0	2	0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%						100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	7 rekening						7 rekening		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 fasilitasi						3 fasilitasi		
2	1	0	2	0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%						100%		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 unit						14 unit		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis						5 jenis		

2	1	0							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kemenkunham	2 ijin										2 ijin
2	1	0	0						Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi	3 koperasi										3 koperasi
2	1	0	0	0	0				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam	3 koperasi										3 koperasi
2	1	0	0						Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan	6 koperasi										6 koperasi
2	1	0	0	0					Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	6 koperasi										6 koperasi

						Kabupaten/Kota												
2	1	0				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	20 koperasi								20 koperasi		
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	35 koperasi								35 koperasi		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	35 koperasi								35 koperasi		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	35 koperasi								35 koperasi		
2	1	0				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi	Sehat 5 kop, cukup sehat 20 kop								Sehat 5 kop, cukup sehat 20 kop		
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	60 koperasi								60 koperasi		

							Kabupaten/Kota										
2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	60 koperasi							60 koperasi	
2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori								4 kategori
2	1	0					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi								110 koperasi
2	1	0	2	0	1		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi								110 koperasi
2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi								110 koperasi
2	1	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	210 koperasi								210 koperasi
2	1	0	2	0	1		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan	210 koperasi								210 koperasi

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Akses Pasar, akses pembiayaan	55 koperasi							55 koperasi		
						Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	110 koperasi							110 koperasi		
2	1	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan	320 UM							320 UM		
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Fasilitas UM	460 UM							460 UM		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data	210 UM							210 UM		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	7 UM							7 UM		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	110 UM							110 UM		

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	310 UM							310 UM		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	5 Kali							5 Kali		
2	1	0				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UM yang berkembang	210 UM							210 UM		
2	1	0	2	0	1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi	310 UM							310 UM		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	110 UM							110 UM		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2)-2020	Tahun (thn n-1)-2021	Tahun (thn n)-2022	Tahun (thn n+1)-2023	Tahun (thn n-2)-2020	Tahun (thn n-1)-2021 (perkiraan)	Tahun (thn n)-2022	Tahun (thn n+1)-2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9+6)/2	(11)=(7)	(12)=(8)	(13)
1	(Indikator Tujuan) Meningkatnya PDRB Sektor Koperasi											
1	(Indikator Sasaran) Persentase Koperasi Berkualitas			75.85	76.76	77.66	78.56	49.16	52.43	81.06	81.10	
2	(Indikator Sasaran) Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat			11.75	12.79	13.83	14.86	0	7.69	30.85	31.85	

1	(Indikator Tujuan) Meningkatnya PDRB Sektor Usaha Mikro											
2	(Indikator Sasaran) Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha			1.15	1.51	1.86	2.19	0.80	1.06	1.32	1.58	

2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas keuangan serta pelaporan	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Penyediaan fasilitas IT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas 2. Sarana gedung yang ada belum dimaksimalkan penggunaannya
		2. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil 2. Masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT
		3. Belum optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	1. Kurangnya pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing
			2. Adanya Keterbatasan prasarana fasilitas IT dalam penyelesaian tugas dan fungsi aparatur
		4. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas	1. Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas masih belum memadai
2. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur dalam hal pelaporan dan akuntabilitas			
		3. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

TC-.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Lembar.....dari.....

No		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Kab. Lumajang	Jumlah UM yang diberdayakan	320 UM	892,500,000	
						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Lumajang	Jumlah Fasilitasi UM	460 UM	892,500,000	
						Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lumajang	Jumlah UM yang di data	210 UM	115,500,000	
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Lumajang	Jumlah usaha mikro yang bermitra	7 UM	78,750,000	
						Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	110 UM	120,750,000	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Lumajang	Jumlah UM yang diberdayakan	310 UM	210,000,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Lumajang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang laksanakan	5 Kali	367,500,000	

						Program pengembangan UMKM	Kab. Lumajang	Jumlah UM yang berkembang	210 UM	315,000,000	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Lumajang	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi	310 UM	315,000,000	
						Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	110 UM	315,000,000	
						Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Kab. Lumajang	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kemenkumham	2 izin	382,725,000	
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	3 koperasi	177,975,000	
						Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	3 koperasi	177,975,000	

						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan	6 koperasi	204,750,000	
						Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam	6 koperasi	204,750,000	
						Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	20 koperasi	824,250,000	
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	35 koperasi	824,250,000	
						Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	35 koperasi	435,750,000	
						Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	35 koperasi	388,500,000	

						Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Kab. Lumajang	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi	945,000,000	
						Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi	945,000,000	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Lumajang	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	110 koperasi	945,000,000	
						Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab. Lumajang	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi	Sehat 5 kop, cukup sehat 20 kop	472,500,000	
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	60 koperasi	472,500,000	
						Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	60 koperasi	315,000,000	
						Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lumajang	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori	157,500,000	
						Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	210 koperasi	892,500,000	
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lumajang	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan	210 koperasi	892,500,000	

						Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	55 koperasi	472,500,000	
							Kab. Lumajang	Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	110 koperasi	420,000,000	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	3,574,396,504	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	10,000,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 dok	2,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	2,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	2,500,000	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 dok	2,500,000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,759,448,504	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	24 ASN	2,722,578,093	
						Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 fasilitasi	29,370,411	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 dok	2,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 dok	2,500,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	2,500,000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	21,000,000	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 stel	21,000,000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	193,525,000	

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	10 jenis	1,575,000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis	35,700,000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis	23,100,000	
							Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	jumlah fasilitas penggandaan dokumen	1 fasilitas		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 jenis	3,150,000	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 fasilitas	10,000,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	3 fasilitasi	120,000,000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitas pengadaan BMD	100%	16,650,000	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	10 jenis	16,650,000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	486,383,000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	jumlah rekening yang dibayar	7 rekening	61,383,000	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lumajang, Lumajang,	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum	3 fasilitas	425,000,000	

						Citrodiwangsan	kantor				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	100%	87,390,000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 unit	6,750,000	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis	43,890,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	12 bulan	36,750,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang, responsif terhadap permasalahan serta isu - isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan koperasi dan usaha mikro sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum MUSRENBANG Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang Kabupaten Lumajang ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.

Tabel T-C.32

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja (ABAIKAN)	Besaran/ Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1	Bantuan Modal Usaha (Dagulir) Dana Pemerintah bagi UMKM	Desa Pasirian Kecamatan Pasirian		100 orang	Kec. Pasirian	Forum PD
2	Bantuan Modal Usaha (Dagulir) Dana Pemerintah bagi UMKM	Desa Sumbersuko Kecamatan Sumbersuko		6 orang	Kec. Sumbersuko	Forum PD
3	Bantuan Modal Usaha (Dagulir) Dana Pemerintah bagi UMKM	Desa Karangbendo Kecamatan Tekung		100 orang	Kec. Tekung	Forum PD
4	Pelatihan Anyaman Bambu	Desa Jatisari Kecamatan Tempeh		1 kegiatan	Kec. Tempeh	Forum PD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);.
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

1. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi

merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan social)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.

2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk merealisasi pelaksanaan Misi, perlu ditetapkan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai, sehingga bisa member arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara umum.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni :

1. Kontribusi PDRB Sektor Koperasi
2. Kontribusi PDRB Sektor Usaha Mikro

Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur persentase koperasi aktif dan persentase pertumbuhan usaha mikro.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama kurun waktu lima tahun (2018 – 2023) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Untuk mencapai tujuan meningkatnya jumlah koperasi aktif dan meningkatnya jumlah usaha mikro maka ada 2 (dua) sasaran, yaitu :

- Meningkatkan kualitas koperasi dan
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha mikro

Meningkatnya kualitas koperasi dan meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha mikro dapat diukur dengan menggunakan tolok ukur persentase koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan persentase koperasi sehat dan cukup sehat serta persentase perkembangan usaha mikro.

Dengan melakukan peningkatan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

3.2.3. Strategi dan kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan - kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola usaha mikro;
- b. Mengoptimalkan pemasaran produk usaha mikro;
- c. Penguatan tatanan kelembagaan koperasi;
- d. Pengembangan kapasitas manajemen usaha mikro.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Meningkatkan kemampuan IT personil;
3. Meningkatkan pemahaman tentang dunia usaha dengan paradig yang baru dan modern;
4. Meningkatkan ketrampilan tentang pengolahan produk;
5. Memberikan pelatihan tentang proses pemasaran yang baik;
6. Memberikan pelatihan manajemen organisasi koperasi;
7. Memberikan pelatihan manajemen usaha koperasi.

3.2.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Seiring dengan misi yang ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada;
- c. Tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas;
- d. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban yang memadai;
- e. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban;
- f. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
- g. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;

3.2.5. Program

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
3. Program Pengembangan UMKM;
4. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam;
5. Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
6. Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2022
1	Nilai PDRB	Meningkatnya kualitas Koperasi	Kontribusi PDRB sector Koperasi		
			Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$ %	77,66 %
			Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat}}{\text{Jumlah koperasi yang aktif}} \times 100$ %	13,83 %
2	Nilai PDRB	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Kontribusi PDRB sector Usaha Mikro		
			Persentase usaha mikro yang berwirausaha	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100$ %	1,86 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
3. Program pengembangan UMKM
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
4. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program pendidikan dan latihan perkoperasian

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

7. Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Lumajang

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100%	3.463.303.837			100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	DINKOP & UM	100%	10.000.000			100%	10.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan		2 Dok	2.500.000	DAU		2 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINKOP & UM	100%	2.634.207.596			100%	2.674.913.517
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan		24 ASN	2.592.913.517	DAU		24 ASN	2.630.413.517
	Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN		1 Fasilitasi	33.794.052	DAU		1 Fasilitasi	37.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD		5 Dok	2.500.000	DAU		5 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan		5 Dok	2.500.000	DAU		5 Dok	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah jenis Laporan		1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	2.500.000

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	DINKOP & UM	100%	14.728.500			100%	19.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan		45 Stel	15.750.000	DAU		45 Stel	19.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	DINKOP & UM	100%	206.039.700			100%	226.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan		40 Jenis	30.822.300	DAU		40 Jenis	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan		8 Jenis	14.539.900	DAU		8 Jenis	16.000.000
		jumlah fasilitasi penggandaan dokumen		1 Fasilitasi				1 Fasilitasi	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan		2 Jenis	3.000.000	DAU		2 Jenis	3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi		1 Fasilitasi	6.750.000	DAU		1 Fasilitasi	7.000.000

		kunjungan tamu							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas korrdinasi dan konsultasi SKPD		3 Fasilitas	150.927.500	DAU		3 Fasilitas	165.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	DINKOP & UM	100%	485.392.168			100%	488.920.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar		7 Rekening	66.328.168	DAU		7 Rekening	67.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor		3 Fasilitas	419.064.000	DAU		3 Fasilitas	421.920.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	DINKOP & UM	100%	111.896.400			100%	117.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara		14 Unit	62.946.400	DAU		14 Unit	65.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara		5 Jenis	48.950.000	DAU		5 Jenis	52.000.000

	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan			100.000.000				100.000.000
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Jumlah Fasilitas UM	Kabupaten Lumajang		100.000.000				280.000.000
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data		200 UM	100.000.000	DAU		200 UM	100.000.000
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra		5 UM	0			5 UM	30.000.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan		100 UM	0			100 UM	20.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan		300 UM	0			300 UM	100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan		3 kali	0			3 kali	30.000.000

	Pemberdayaan Usaha Mikro								
	Program pengembangan UMKM	Jumlah UM yang berkembang			1.166.815.000				1.166.815.000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi	Kabupaten Lumajang		1.166.815.000				1.166.815.000
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		100 UM	1.166.815.000	DBHCHT		100 UM	1.166.815.000
	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kemenkumham							50.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi	Kabupaten Lumajang						30.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	Jumlah fasilitasi		2 Koperasi	0			2 Koperasi	30.000.000

	Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	memenuhi izin usaha simpan pinjam							
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan	Kabupaten Lumajang						20.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam		5 Koperasi	0			5 Koperasi	20.000.000
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan			139.898.250				155.000.000

	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kabupaten Lumajang		139.898.250				155.000.000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi		30 Koperasi	29.898.250	DAU		30 Koperasi	35.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan		30 Koperasi	110.000.000	DAU		30 Koperasi	120.000.000
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan			491.010.000				500.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Lumajang		491.010.000				500.000.000

	Kota								
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan		100 Koperasi	491.010.000	DAK Non Fisik		100 Koperasi	500.000.000
	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi			97.782.200				130.000.000
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	Kabupaten Lumajang		97.782.200				130.000.000
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		50 Koperasi	75.222.200	DAU		50 Koperasi	100.000.000
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan		50 Koperasi	22.560.000	DAU		50 Koperasi	30.000.000
	Program pemberdayaan dan	Jumlah koperasi							200.000.000

	Perlindungan koperasi	yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan							
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan	Kabupaten Lumajang						200.000.000
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan		50 Koperasi	0			50 Koperasi	120.000.000
		Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi		100 Koperasi	0			100 Koperasi	80.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Utama

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :

Program Utama dan Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Taget	
		Kinerja	Pendanaan (Rp)
2	3	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	2.615.460.952
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah perencanaan dan evaluasi		0
a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan		0
b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		0
c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		0
d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		0
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD		0

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.155.014.232
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	21 orang	2.155.014.232
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN		0
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi		0
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan		0
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun		0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	25.696.120
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan		0
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	50 jenis	18.138.120
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis	7.558.000
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan		0
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu		0
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD		0

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase fasilitasi pengadaan BMD		0
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan		0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	395.350.600
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	7 rekening	71.471.400
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	4 fasilitasi	323.879.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	39.400.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	15 unit	25.900.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yang dipelihara	5 jenis	13.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	85%	12.368.300.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Fasilitasi UM	320 UM	12.368.300.000
a	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data		

b	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra		
c	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		
d	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	320 UM	12.368.300.000
e	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Perkembangan UMKM	80%	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi		
a	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		0
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	80%	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam		
a	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam		0

	Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan		
a	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam		0
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	61%	32.400.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	100 koperasi	32.400.000
a	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	50 koperasi	26.400.000

b	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	50 koperasi	6.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PER KOPERASIAN		Persentase Pendidikan Perkoperasian	46%	404.200.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	200 koperasi	404.200.000
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	200 koperasi	404.200.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Kesehatan Koperasi	14%	75.360.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 koperasi	75.360.000
a	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 koperasi	52.800.000
b	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori	22.560.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	38%	14.999.850

	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan	20 koperasi	14.999.850
a	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	10 koperasi	14.999.850
		Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi		0

4.2 Alokasi Anggaran

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 15.510.720.802,-** dengan perincian untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.155.014.232,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 13.355.706.570,-** Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2022.

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LUMAJANG

